

**ANALISA DAMPAK EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI ERA PANDEMI  
COVID-19 PADA KECAMATAN SILANGKITANG  
KABUPATEN LABUHAN BATU  
SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna Memenuhi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : Ade Fitriani Harahap  
NPM : 1705180028  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri Ba No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.


**MEMUTUSKAN**

Nama Lengkap : ADE FITRIANI HARAHAP  
N P M : 1705180028  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISA DAMPAK EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI ERA PANDEMI COVID-19 PADA KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN  
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

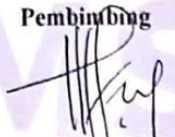
Penguji I

  
Dra. ROSWITA HAENI, SE., M.Si

Penguji II

  
ERİYANTI NASUTION, S.E., M.Ec

Pembimbing

  
SRI ENDANG RAHAYU, S.E., M.Si


TIMPENGGUJI

Ketua

  
H. JANURI, S.E, M.M., M.Si



Sekretaris

  
Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : ADE FITRIANI HARAHAP  
NPM : 1705180028  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISA DAMPAK EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI ERA PANDEMI COVID-19 PADA KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021

Pembimbing

**SRI ENDANG RAHAYU, S.E., M.Si**

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Dr. PRAWIDYA HARIANI, S.E., M.Si**

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis



**H. JAMURI, S.E., M.M., M.Si**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ade Fitriani Harahap

NPM : 1705180028

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul " Analisa Dampak Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Era Pandemi Covid-19 Pada Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan "Adalah bersifat asli (original) ,bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**Yang Menyatakan**



(Ade Fitriani Harahap)

## ABSTRAK

### **Ade Fitriani Harahap (1705180028) Analisa Dampak Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Era Pandemi Covid-19 Pada Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Skripsi 2021**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa perkembangan kualitas hidup rumah tangga penerima kebijakan program keluarga harapan (PKH) di masa pandemi covid-19 pada Desa Uulumahuam Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kecamatan Silangkitang. Menganalisis perkembangan dana kebijakan PKH sebelum dan di masa pandemi covid-19 di Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mengevaluasi keluarga penerima kebijakan PKH di kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Seletan. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis pendekatan deskriptif induktif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jumlah populasi pada penelitian berjumlah 359 penduduk. Penelitian ini menetapkan 50 responden dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi perbandingan kebijakan PKH sebelum masa pandemi dan di masa pandemi. Ada perbedaan nilai rata-rata sebesar 117.34 kebijakan PKH sebelum masa pandemi denga kebijakan PKH di masa pandemi sebesar 111.22 dengan selisih nilai rata-rata sebesar 6,12. Terdapat perbedaan kebijakan PKH sebelum Pandemi dengan kebijakan PKH di masa Pandemi dengan perolehan nilai sig  $0,023 < \alpha = 0,10$  atau dengan persentase  $2,3\% < \alpha = 10\%$ .

**Kata Kunci : Kebijakan PKH, Pandemi Co vid 19**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisa Dampak Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Era Pandemi Covid 19 Pada Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan Skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Terima kasih untuk yang istimewa untuk kedua orang tua saya tercinta yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan Skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual

kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januari S.E.,M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E.,M.Si.selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy S.E., M.Si.selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Prawidya Hariani, SE,Msi, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Dra. Roswita Hafni S.E.,M.Si selaku sekretaris program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Sri Endang Rahayu, SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan Skripsi
9. Bapak dan Ibu Dosen yang sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman pembelajaran kepada penulis, serta staf pegawai yang banyak membantu penulis selama proses pelaksanaan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada sahabat-sahabat saya khususnya Meli, Maya, Novi, Devi, Fany, Vivi yang sudah saling support dan sama sama berjuang untuk penulisan skripsi

ini

11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan atas semangat, dukungan dan arahan baik yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Skripsi ini dapat penulis lanjutkan dalam penelitian dan akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang menjadi salah satu syarat penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

*Wassalammualaikum, Wr. Wb*

Medan, September 2021

Penulis

**ADE FITRIANI HARAHAP**

**NPM : 1705180028**



## DAFTAR ISI

Halaman

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah .....	7
1.3.1 Batasan Masalah.....	7
1.3.2 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	8
1.5.1 Bagi Pemerintah Daerah .....	8
1.5.2 Bagi Peneliti.....	8
1.5.3 Bagi Pembaca.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1 Uraian Teori .....	9
2.1.1. Efektivitas.....	9
2.1.2 Program Pemerintah .....	22
2.1.3 Pengertian Program Keluarga Harapan .....	23

2.1.4 Tujuan Program Keluarga Harapan .....	24
2.1.5 Penerima Program Keluarga Harapan.....	24
2.2 Penelitian terdahulu.....	25
2.3. Gambar Kerangka Konseptual .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	28
3.2 Defenisi Operasional Variabel .....	28
3.3 Tempat waktu dan Penelitian .....	29
3.3.1 Tempat Penelitian.....	29
3.3.2 Waktu Penelitian .....	29
3.4 Populasi dan Sampel.....	29
3.4.1 Populasi .....	29
3.4.2 Sampel .....	29
3.5 Jenis Dan Sumber Data .....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Tehnik Analisis data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	38
4.2. Pembahasan.....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
5.1. Kesimpulan .....	54
5.2. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Data Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi di Indonesia .....	2
Tabel 1.2	Jumlah Pendudukan Miskin Provinsi Sumatera Utara .....	5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Labuhan Batu Selatan.....	6
Tabel IV.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	43
Tabel IV.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	43
Tabel IV.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	44
Tabel IV.4	Data Uji Komparatif (T-Tes) .....	45
Tabel IV.5	Independent Samples Test .....	46

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Perubahan Budget Line karena adanya Pengeluaran Pemerintah
	..... 14
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual.....27
Gambar IV.1	Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis .....47

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar ke empat di dunia, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa. Indonesia saat ini terdiri dari 17.508 pulau, sekitar 6.000 diantaranya dihuni, terbagi menjadi 34 provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi 403 Kota dan 98 kota. Ada sekitar 300 kelompok yang berbeda etnis pribumi di Indonesia, dan 742 bahasa dan dialek yang berbeda (BPS, 2015).

Dengan populasi penduduk sebesar ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat seperti kemacetan, kemiskinan, dan lain-lain. Masalah seperti ini sering terjadi di sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah sudah sangat baik dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan saat ini belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang. Banyak sekali penduduk Indonesia saat ini yang masih hidup

dalam keadaan miskin dan bahkan sangat miskin, yang membuat mereka tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya.

Menurut Mubyarto (2010), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Para ahli ilmu sosial sependapat bahwa penyebab utama kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun, banyak ahli yang juga percaya bahwa kemiskinan bukanlah suatu gejala yang terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi. Kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang melibatkan hampir semua aspek yang dimiliki manusia dalam kehidupannya.

**Tabel I.1**

**Data Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi di Indonesia**

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin		
	2018	2019	2020
Aceh	584	541	513
Sumatera Utara	1146	1044	1274
Sumatera Barat	200	179	138
Riau	255	248	227
Jambi	265	245	224
Sumatera Selatan	1212	1239	1231
Bengkulu	167	166	164
Lampung	1230	1268	1113

Kep. Bangka Belitung	4	1	2
Kep. Riau	27	13	42
Dki Jakarta	24	30	7
Jawa Barat	5453	5319	5660
Jawa Tengah	6648	6247	6427
Di Yogyakarta	486	513	491
Jawa Timur	6359	5835	6425
Banten	648	620	557
Bali	260	251	246
Nusa Tenggara Barat	997	950	954
Nusa Tenggara Timur	1684	1724	1734
Kalimantan Barat	419	385	349
Kalimantan Tengah	138	125	106
Kalimantan Selatan	176	174	146
Kalimantan Timur	31	29	26
Kalimantan Utara	7	6	2
Sulawesi Utara	346	324	324
Sulawesi Tengah	420	396	376
Sulawesi Selatan	1801	1765	1800
Sulawesi Tenggara	642	608	587
Gorontalo	323	300	288
Sulawesi Barat	325	343	349
Maluku	242	190	160
Maluku Utara	93	82	86
Papua Barat	141	109	119
Papua	621	596	553

<b>Indonesia</b>	33364	31843	33458
------------------	-------	-------	-------

Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mulai dari tahun 2018-2020 jumlah penduduk Indonesia Mengalami Peningkatan pada tahun 2018 sebesar 264.161 juta jiwa mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 266.911 jiwa dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan 269.603 jiwa, begitu juga dengan tingkat penduduk dibawah garis kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 12,63% dari jumlah penduduk mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 11,93% sedangkan di tahun 2020 jumlah pendudukan yang hidup dibawah garis kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 12,41% dari jumlah penduduk Indonesia, peningkatan persentase pendudukan miskin pada tahun 2020 disebabkan adanya dampak dari masa pandemi covid 19 yang banyak menyebabkan pengurangan tenaga kerja dan banyak usaha yang tutup.

Kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut, apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Kebutuhan hidup minimum ini antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah diatas garis kemiskinan. Sehingga, sebenarnya tidak termasuk miskin, tetapi masih lebih miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.



Tabel I.2

## Jumlah Pendudukan Miskin Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Kota	Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara		
	2018	2019	2020
Nias	23.263	22.769	23.791
Mandailing Natal	42.105	40.402	41.061
Tapanuli Selatan	25.519	24.104	23.880
Tapanuli Tengah	47.900	46.382	46.631
Tapanuli Utara	29.036	28.429	28.278
Toba Samosir	15.761	15.710	16.001
Labuhan Batu	41.207	41.059	41.709
Asahan	73.669	70.120	65.973
Simalungun	79.994	76.091	73.426
Dairi	23.114	21.807	22.858
Karo	34.958	33.716	36.181
Deli Serdang	87.334	83.854	85.194
Langkat	104.888	102.609	101.365
Nias Selatan	52.347	52.181	53.552
Humbang Hasundutan	16.802	16.492	17.801
Pakpak Bharat	4.596	4.461	4.541
Samosir	16.738	15.752	15.748
Serdang Bedagai	50.382	48.555	49.127
Batu Bara	51.423	50.137	49.479
Padang Lawas Utara	26.447	25.706	26.453
Padang Lawas	22.690	22.813	23.540
Labuhanbatu Selatan	16.341	16.019	16.646
Labuanbatu Utara	36.198	34.541	34.672
Nias Utara	36.146	34.237	34.588
Nias Barat	21.718	20.832	21.105
Sibolga	10.782	10.792	10.471
Tanjungbalai	25.062	24.332	23.357
Pematangsiantar	21.882	21.877	21.115
Tebing Tinggi	16.502	16.161	16.194
Medan	185.413	182.943	182.620
Binjai	15.930	15.502	15.794
Padangsidempuan	16.611	15.892	16.415
Gunungsitoli	25.683	22.872	23.372
<b>Jumlah</b>	<b>1.146.782</b>	<b>1.044.892</b>	<b>1.274.563</b>

Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mulai dari tahun 2018-2020 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada tahun 2018 sebesar 1.146.782 juta jiwa mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 1.044.892 jiwa dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan 1.274.563 jiwa,

**Tabel I.3**

**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dari Tahun  
2018-2020**

Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin		
	2018	2019	2020
Sungai Kanan	2.717	2.657	2.774
Torgamba	1.608	1.584	1.630
Kotapinang	3.120	3.066	3.170
Silangkitang	5.850	5.732	5.963
Kampung Rakyat	3.046	2.980	3.109
<b>Jumlah</b>	<b>16.341</b>	<b>16.019</b>	<b>16.646</b>

Sumber : <https://labuhanbatuselatankab.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel I.3 maka dapat dilihat jumlah penduduk miskin Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tahun 2018 sebesar 16.341 mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 160.19 sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengalami peningkatan menjadi 16.646

Kemiskinan yang terjadi di daerah ini disebabkan oleh rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat daerah tersebut, hal ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki warga Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sehingga, banyak warga yang menganggur karena sulitnya memperoleh pekerjaan karena pendidikan yang rendah juga, karena hal inilah tingkat kepercayaan perusahaan-perusahaan daerah tersebut pun menjadi rendah untuk mempekerjakan masyarakat setempat di perusahaan mereka. Kemiskinan

tersebut juga terjadi karena kondisi alam yang bisa dilihat semakin buruk. Karena pekerjaan masyarakat Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dominan sebagai Nelayan, mereka hanya bisa menangkap ikan tergantung pada keadaan cuaca. Terkadang kondisi laut yang pasang surut yang tidak menentu menyebabkan pendapatan penghasilan ikan nelayan juga tidak menentu.

Pemerintah dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH), program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan

kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Serta mengubah kelompok yang paling miskin, dengan adanya bantuan sosial PKH yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari serta mampu meningkatkan kesejahteraan akibat kesulitan ekonomi terhadap pengeluaran rumah tangga. Seperti yang kita ketahui banyak masyarakat miskin atau penerima bantuan masih banyak yang mengeluh kesulitan ekonomi padahal pemerintah sudah melakukan upaya dengan adanya PKH diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin. Namun dana atau bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat banyak yang sudah menyalahgunakan dengan membeli barang yang tidak dibutuhkan sama sekali.

Seperti yang kita ketahui banyak saat ini yang terjadi penerima bantuan yang tidak tepat sasaran sebagian beberapa masyarakat mengaku tidak mampu padahal mampu dan tidak layak menerima bantuan sosial akan tetapi ikut mendaftarkan diri menjadi calon anggota PKH. Kejadian seperti ini sering terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Meskipun sudah ditetapkan kriteria

penerima PKH namun banyak yang dikatakan mampu menjadi salah satu penerima PKH. Hal ini menyebabkan banyak data masyarakat miskin yang masih diragukan sehingga akan berdampak dengan ketidaktepat sasaran bantuan dana PKH terhadap masyarakat yang berhak. Sehingga bukan orang miskin lagi yang menerima bahkan orang lain dapat menerima PKH.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Sudah adanya program PKH akan tetapi masih ada penduduk miskin di Indonesia.
2. PKH dipusatkan untuk membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam memutus mata rantai kemiskinan.
3. PKH memiliki kriteria yang sudah ditetapkan namun banyak calon anggota PKH yang masih saja tidak memenuhi kriteria penerima PKH.

## **1.3. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah**

### **1.3.1. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya terbatas pada dampak covid 19 terhadap evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dari rumah tangga penerima di tiga Desa Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan kualitas hidup rumah tangga penerima kebijakan program keluarga harapan (PKH) di masa pandemi covid 19 pada Desa Uulumahuam Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kecamatan Silangkitang?
2. Bagaimana perkembangan dana kebijakan PKH sebelum dan di masa pandemi covid 19 di Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?
3. Bagaimana evaluasi keluarga penerima kebijakan PKH di kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Melakukan analisa perkembangan kualitas hidup rumah tangga penerima kebijakan program keluarga harapan (PKH) di masa pandemi covid 19 pada Desa Uulumahuam Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kecamatan Silangkitang
2. Menganalisis perkembangan dana kebijakan PKH sebelum dan di masa pandemi covid 19 di Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Mengevaluasi keluarga penerima kebijakan PKH di kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

### **1.5.1 Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai ketepatan sasaran bagi masyarakat miskin yang akan mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).

### **1.5.2 Manfaat Akademis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penelitian mengetahui fenomena yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan peneliti dapat mengetahui dampak kebijakan yang diterima oleh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di masa pandemi covid 19.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1. Pembangunan Ekonomi**

Secara umum Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi secara luas didefinisikan sebagai pembangunan yang terjadi melalui proses multidimensional yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam variabel dari perubahan besar yang dimana terjadi dalam sebuah struktur sosial, sikap dari masyarakat, berbagai macam kelembagaan nasional dan juga percepatan dari pertumbuhan ekonomi, dan juga pengurangan serta ketidakmerataan, dan yang terakhir adalah penghapusan dari kemiskinan mutlak (Todaro, 2000). Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dalam Todaro dan Smith, (2006).

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industri – industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar – pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan – perusahaan baru,



dimana kesemuanya ini merupakan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah. Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi berisi strategi pembangunan daerah yang dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Pengertian pembangunan dalam hal ini banyak digunakan para pembuat kebijakan sebagai usahanya membangun stabilitas perekonomian negara (Jhingan, 2014).

Pembangunan memiliki konsep melalui proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu dalam Todaro . Oleh karena itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Upaya pembangunan juga untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro & Smith, 2011).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi

yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro & Smith, 2011)

Todaro dalam (Arsyad 1999:5) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi: pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*). Kedua, meningkatnya rasa harga diri (*selfesteem*) masyarakat sebagai manusia; dan ketiga, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental dari suatu masyarakat, melalui kombinasi tertentu dari proses, sosial, ekonomi, dan lembaga yang memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tujuan (Todaro & Smith, 2011) .

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualisme ekonomi antara desa dan kota. Jika

hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2011)

### **1. Teori Klasik**

Teori klasik secara ringkas kebijaksanaan pasar bebas. Ahli ekonomi klasik menyakini adanya prekonomian persaingan pasar sempurna dan pasar bebas yang secara otomatis bebas dari segala campur tangan pemerintah. Yang akan memaksimalkan pendapatan nasional. Pemupukan modal kunci ke arah kemajuan semua kaum klasik memandang pemupukan modal sebagai kunci ke arah kemajuan. Karena itu ditekankan betapa pentingnya tabungan dalam jumlah yang besar. Hanya pemilik modal dan pemilik tanah yang mampu untuk menabung, kelas pekerja tidak mampu menabung karena mereka hanya menerima upah yang besarnya sama dengan tingkat kebutuhan hidup minimal.

Keuntungan, Rangsang bagi investasi. Menurut kaum klasik, keuntungan merangsang investasi. Semakin besar keuntungan, semakin besar pula akumulasi modal dan investasi. Keuntungan cenderung menurun. Keuntungan tidak akan naik secara terus-menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan untuk menghimpun modal antar kapitalis meningkat. Menurut Smith, alasannya ialah naiknya upah sebagai akibat persaingan antarkaum kapitalis. Sementara upah dan sewa naik karena naiknya harga jagung menurut Ricardo, keuntungan akan menurun.

Keadaan stationer semua para ahli ekonomi klasik pada akhir proses pemupukan modal. Sekali keuntungan mulai menurun, proses ini akan

berlangsung terus sampai keuntungan menjadi nol, pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal terhenti, dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minima.

Malthus menunjukkan adanya korelasi khusus antara pertumbuhan penduduk dan persediaan makanan. Menurutnya, jika pertumbuhan penduduk di biarkan tak terkendali, maka ia akan melampaui pertumbuhan modal dan juga sarana bagi kebutuhan hidup. Ricardo dan Malthus melihat pertumbuhan penduduk dan kemerosotan pertumbuhan modal sebagai akibat bekerjanya hukum “ hasil yang semakin menurun “, sebagian penghalang akhir pembangunan ekonomi.

Dalam garis besar, teori klasik pembangunan ekonomi dapat di nyatakan demikian. Misalkan kenaikan keuntungan yang di harapkan, dapat menaikkan investasi sehingga menambah stok modal yang telah ada dan mendorong penyempurnaan teknik. Kenaikan dalam pemupukan modal menaikkan jumlah cadangan upah. Sebagai akibatnya, upah naik. Upah yang lebih tinggi mengundang pertumbuhan penduduk, yang menyebabkan permintaan akan makanan menjadi naik. Produksi makanan ditingkatkan dengan menggunakan buruh dan modal tambahan. Tetapi hasil yang semakin menurun pada tanah akan mengakibatkan upah buruh menjadi naik. Akibatnya, harga jagung membumbung dan sebaliknya sewa naik, upah naik dan karena itu keuntungan mengurang. Penurunan keuntungan menandakan penurunan dalam investasi, menghambat kemajuan teknologi, mempersusut cadangan upah, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi penduduk dan pemupukan modal. “ Dalam model klasik, hasil akhir pembangunan kapitalistik adalah stagnasi. Stagnasi terjadi karena kecendrungan alamiah keuntungan untuk menurun dan sebagai konsekuensi

lemahnya pemupukan modal.” Jika hal ini terjadi, pemupukan modal berhenti, penduduk mandek dan keadaan stationer terjadi.

Para pemikir dasawarsa 1950-an dan 1960-an memandang proses pembangunan sebagai serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan yang harus di lalui semua negara. Pada dasarnya adalah teori ekonomi pembangunan yang mensyaratkan adanya kuantitas serta kombinasi tabungan, investasi, dan bantuan luar negeri yang tepat agar negara-negara berkembang dapat bergerak di sepanjang jalur pertumbuhan sebagaimana sebelumnya negara-negara yang lebih maju. Dengan demikian, pembangunan menjadi sinonim dengan pertumbuhan ekonomi agregat yang berlangsung.

Dalam teori ini terdapat dua aliran yaitu: Aliran pertama, yang berfokus pada teori dan pola perubahan struktural, menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistik dalam upaya menggambarkan proses internal perubahan struktural yang harus di laksanakan negara berkembang “ pada umumnya “ agar berhasil menciptakan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Aliran kedua, revolusi ketergantungan internasional, lebih radikal dan politis. Aliran ini memandang keterbelakangan dalam kaitanya dengan hubungan internasional dan kekuasaan domestik, kekakuan lembaga dan struktur ekonomi, serta berkembang pesatnya dualisme kehidupan ekonomi dan masyarakat baik di dalam negri maupun di antara negara-negara dunia. Penekanan diletakkan pada perlunya kebijakan baru dan utama memberantas kemiskinan, menyediakan kesempatan kerja yang lebih beragam dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

## **2. Teori Neoklasik**

Ekonomi Keynesian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi *Great Depression*, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer.

Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah (Jhingan, M.L, 2014)

Bagi negara maju kontrarevolusi neoklasik merupakan aliran dan kebijakan makro ekonomi yang lebih mementingkan sisi penawaran, teori ekspektasi nasional dan gelombang-gelombang swastanisasi perusahaan milik negara. Bagi negara berkembang, kontrarevolusi berarti pasar bebas dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian nasional dan regulasi pemerintah terhadap kegiatan ekonomi. Menurut para tokoh kontrarevolusi neoklasik, campur tangan

pemerintah dalam kegiatan ekonomi menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi dengan adanya pasar bebas (*free market*) di mana naik atau turunnya harga barang maupun jasa bergantung pada permintaan dan penawaran di pasar.

Analisis pasar bebas (*Freemarket Analysis*) menyatakan bahwa pasar-pasar itu sendiri sudah efisien. Pasar produk memberikan sinyal terbaik tentang investasi dan kegiatan apa yang layak dikerjakan untuk mencapai keuntungan.

Teori pertumbuhan neoklasik tradisional model pertumbuhan Solow merupakan pengembangan dari formulasi Harrod Domar dengan menambahkan faktor yaitu tenaga kerja, serta memperkenalkan variabel independen dan faktor teknologi. Harrod Domar mengasumsikan skala hasil tetap (*konstant return to scale*) dengan koefisien baku, Solow berpangang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing return*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya di analisis terpisah. Jika bersamaan, Solow memakai skala hasil tetap.

Memakai fungsi produk agregat standar:

$$Y = K^{\alpha} (AL)^{1-\alpha}$$

Dimana :

Y = Produk domestik bruto.

K = Persediaan modal

L = Tenaga kerja.

A = Produktifitas tenaga kerja .

Menurut teori pertumbuhan neoklasik tradisional, hasil pertumbuhan output bersumber dari satu atau dari tiga faktor : peningkatan kuantitas dan



kualitas tenaga kerja (pertumbuhan penduduk dan pendidikan), peningkatan modal (melalui tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi.

### **2.1.2. Pendapatan Negara**

Menurut Dumairy (1996:37) Pendapatan Nasional dapat berarti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pendapatan nasional adalah terjemahan langsung dari national income. Sedangkan dalam arti luas, pendapatan nasional dapat merujuk ke produk Domestik Bruto(PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) ; atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP); Produk Nasional Neto (PPN) atau Net National Product (NNP); atau merujuk ke pendapatan Nasional (PN) alias National Income (NI).

Pendapatan Nasional dapat juga diartikan sebagai produksi Nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun.

#### **a.Konsep Pendapatan Nasional**

##### 1) Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi didalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun.

$GDP = \text{Pendapatan Masyarakat DN (dalam negeri)} + \text{Pendapatan Asing DN (dalam negeri)}$ .

Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut.

## 2) Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (Nasional) selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan diluar negeri.

$$\text{GNP} = \text{Pendapatan WNI DN} + \text{Pendapatan WNI LN (luar negeri)} - \text{Pendapatan Asing DN}$$

## 3) Produk Nasional Netto (NNP)

$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{depresiasi (penyusutan barang modal)}$  Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil.

## 4) Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (*Net National Income*) merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak Tidak Langsung}$$

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dll.

## 5) Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji pegawai negeri, maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai.

$PI = NNI - \text{Pajak perusahaan} - \text{Iuran} - \text{Laba ditahan} + \text{transfer payment}$

Transfer Payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya.

#### 6) Pendapatan yang siap dibelanjaka

Disebut juga dengan disposable Income yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.

$DI = PI - \text{Pajak Langsung}$

Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan.

### 2.1.3. Pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### 1. Macam-macam Pengeluaran Negara

Menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 2, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat.

Menurut Organisasi pengeluaran negara digolongkan menjadi 3, yakni :

##### a. Pemerintah Pusat

Dalam pemerintah Pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi 2

yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dll. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta dana ekonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri.

b. Pemerintah Provinsi

Jika di pemerintah pusat terdapat APBN , maka di pemerintah Provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari pemungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dana perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain dan belanja tak terduga.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

APBD dalam Kabupaten/kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan, Bagi hasil pendapatan desa/kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/kelurahan, bagi hasil retribusi ke Desa/kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/kelurahan, pengeluaran untuk pembiayaan, terdiri dari, pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya.

Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5, antara lain :

a. Pengeluaran Investasi

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll.

b. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

c. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat

Pengeluaran kesejahteraan Rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll.

d. Pengeluaran Penghematan Masa Depan

Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar dimasa yang akan datang, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dll.

e. Pengeluaran Yang Tidak Produktif

Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang.

## 2.2. Program Pemerintah

Masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Sebenarnya sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, namun belum membawa perubahan yang berarti.

Program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat. Sehingga terjadi *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan.

Ada empat strategi penanggulangan kemiskinan yang diajukan melalui penciptaan kesempatan (*create opportunity*), pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) dengan peningkatan akses kepada sumber daya ekonomi dan politik, peningkatan kemampuan (*increasing capacity*) melalui pendidikan dan perumahan, dan perlindungan sosial (*social protection*) untuk mereka yang menderita cacat fisik, fakir miskin, keluarga terisolasi, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan korban konflik sosial.

Terkait dengan strategi tersebut diatas. Pemerintah telah menetapkan instrument penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan 4 klaster :

- a) Klaster 1 program berbasis keluarga

- b) Klaster II Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
- c) Klaster III penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil.

### **2.2.1. Pengertian Program Keluarga Harapan**

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Mathis (2002:5) mengemukakan bahwa “PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.

Menurut Oemar Humalik (2001:10) “Program keluarga harapan ( PKH ) ialah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin ( RTSM ) jika mereka. memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) yaitu pendidikan dan kesehatan.

Veithzal Rivai ( 2004:227 ) “Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan, kedudukan PKH merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan lainnya. Program keluarga harapan berada dibawah TIM koordinasi penanggulangan kemiskinan ( TKPK ), baik di pusat maupun di daerah.”.

Menurut beberapa pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa bantuan tunai bersyarat, program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai. (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program keluarga harapan lebih dimaksudkan upaya membangun sistem perlindungan social kepada masyarakat miskin.

Menurut P.Siagian dalam Irham Fahmi (2007:72) mengemukakan serangkaian tujuan tujuan atau sasaran dari program keluarga harapan adalah sebagai berikut :

1) Tujuan Umum.

Adapun tujuan umum dari program keluarga harapan ini yaitu untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, serta lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan merubah perilaku RTSM yang relative kurang peningkatan kesejahteraan.

2) Tujuan khusus.

Adapun tujuan dari program keluarga harapan Secara khusus terdiri atas:

- a) Meningkatkan status social ekonomi RTSM
- b) Meningkatkan status kesehatan dan gizi, ibu hamil, ibu nifas anak balita usia 2-7 tahun yang masuk sekoalah dasar dari RTSM



- c) Meningkatkan kualitas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya anak-anak RTSM.
- d) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM

Kriteria penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin sesuai dengan kriteria BPS, yang memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak yang berusia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD/MI, SLTP/MTS dan anak yang berusia 15-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Selain kriteria tersebut maka mereka tidak mendapatkan bantuan dari program tersebut, meskipun dalam data BPS .

Adapun besaran bantuan bagi penerima Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut :

1. Bantuan tetap : Rp: 200.000
2. Anak usia dibawah 6 tahun : Rp: 800.000
3. Ibu hamil/menyusui : Rp: 800.000
4. Anak usia SD/MI : Rp: 400.000
5. Rata-rata bantuan per RTSM : Rp: 1.390.000
6. Bantuan minimum per RTSM Rp: 600.000
7. Bantuan maksimal per RTSM Rp: 2.200.000

### **2.2.2 Tujuan Program Keluarga Harapan**

Program keluarga harapan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, KPM dalam megakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keungan formal kepada KPM.

### 2.2.3. Penerima Program Keluarga Harapan

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial :

1. Komponen kesehatan
  - a) Ibu hamil/nifas/menyusui
  - b) Anak usia dini

2. Komponen Pendidikan

Kreteria PKH yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/Mi sederajat atau SMP/mts sederajat/ dan atau SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial
  - a) Lanjut usia
  - b) Penyandang disabilitas berat.

### 2.2. Penelitian Terdahulu

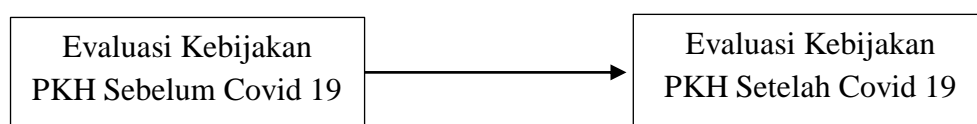
Judul, Nama Penulis, Tahun	Variabel penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
Dampak Bantuan langsung tunai dan investasi		Kualitatif	Kebijakan BLT dan peningkatan investasi sumberdaya manusia

<p>sumberdaya manusia terhadap ekonomi rumah tangga sekitar hutan pinus di desa samagede, S Andy Cahyono (2010)</p>			<p>(pendidikan dan kesehatan gratis) ternyata berdampak pada perubahan perilaku ekonomi petani sekitar hutan pinus. Kebijakan BLT cenderung membuat penyadap tidak produktif (malas) dan menurunkan produksi getah pinus serta meningkatkan konsumsi terutama non pangan. Semakin besar BLT akan berdampak besar pada ekonomi rumah tangga, meskipun demikian BLT mampu mendorong investasi sumberdaya manusia secara signifikan ketika BLT ditingkatkan tiga kali lipat.</p>
<p>Bantuan langsung tunai, Selviana (2016)</p>		<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>1. Implementasi bantuan langsung tunai dikelurahan karena kecamatan mamuju kabupaten mamuju hampir semua sudah mengenai rumah tangga sasaran tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak tersentuh bantuan hal ini disebabkan karena pendataan yang dilakukan tidak menyentuh semua sasaran rumah tangga miskin dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang program bantuan langsung tunai sehingga banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh atau menerima bantuan padahal masyarakat tersebut layak untuk menerima bantuan</p>

			2. Dampak bantuan langsung tunai terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah bantuan langsung tunai ini dianggap tidak efektif dan efisien karena kurang membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat hal ini disebabkan masyarakat menggunakan dana tersebut bukan untuk jangka panjang atau bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan sehari-hari dan dampak lainnya yaitu masyarakat menjadi ketergantungan terhadap bantuan langsung tunai karena masyarakat terus mengharapkan bantuan dari pemerintah.
Implementasi kebijakan tentang bantuan langsung tunai (BLT) sebagai program keluarga harapan (PKH) di desa penaga kabupaten bintang, R.FINAHARI (2018)	1.mudah tidaknya masalah dikendalikan 2.Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi 3.Lingkungan	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dilapangan maka pada bab ini peneliti membuat kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bintang secara umum dapat dikategorikan cukup baik

### 2.3 Gambar Kerangka Konseptual

Dari latar belakang penelitian dan landasan teori penelitian, maka peneliti dapat membuat kerangka konseptual sebagai berikut :



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis pendekatan deskriptif induktif. Dimana penelitian ini semua faktor baik lisan maupun tulisan dari sumber data yang diambil dan disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Teknik pelaksanaan dari penelitian ini menggunakan metode survei yang merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk sample dari sebuah populasi (“Buku Metode Penelitian Surveill,” 2017).

#### **3.2. Defenisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah program keluarga harapan (PKH) dan pengeluaran rumah tangga, tujuannya untuk mengetahui perbedaan kebijakan PKH sebelum pandemi dan di masa pandemi. Defenisi variabelnya adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
2. **Program keluarga Harapan (PKH)** adalah program pemberian bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu yang terdapat pada data terpadu

kesejahteraan sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai penerima PKH.

3. Kualitas Hidup adalah sejauh mana seorang individu sehat, nyaman, dan mampu berpartisipasi dalam atau menikmati peristiwa kehidupan

### **3.3 Tempat Waktu Dan Penelitian**

#### **3.3.1 Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun alasan pemilihan lokasi dikarenakan Desa Ulumahuam memiliki banyak penduduk miskin yang mayoritas mendapatkan dana program keluarga harapan (PKH).

#### **3.3.2 Waktu Penelitian**

Waktu yang diperlukan peneliti untuk penelitian ini sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian. Waktu Penelitian dilakukan terhitung mulai dari bulan Febuari s.d Juni tahun 2021.

### **3. 4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi adalah seluruh objek, subjek, karakteristik, yang ada pada penelitian. Dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah seluruh rumah tangga yang menerima program keluarga harapan (PKH) sebelum dan masa pandemi covid-19 di Kecamatan Silangkitang yang terdiri dari Desa Ulumahuam Kerasaan yang berjumlah 299 kepala rumah tangga dan Desa Rintis yang berjumlah 63 orang. jadi jumlah populasi pada penelitian berjumlah 359 penduduk

### 3.4.2 Sampel

Sampel adalah kelompok kecil (bagian) dari populasi yang diambil dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling*, karena penulis sudah berusaha meminta data sampai penyelesaian proposal ini untuk mendapatkan jumlah penduduk yang menerima PKH Kecamatan Silangkitang sebelum dan masa pandemi maka penulis menetapkan 50 responden dengan menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu penduduk miskin yang menerima bantuan PKH sebelum dan di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pembagian sampel adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Data Sampel Penelitian**

No	Desa	Sampel
1	Desa Ulumahuam	25 Penduduk
2	Desa Rintis	25 Penduduk
<b>Jumlah</b>		<b>50 Penduduk</b>

### 3.5 Jenis Dan Sumber Data

Adapun sumber dan jenis data yang dalam penelitian ini dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada responden atau beberapa rumah tangga penerima program

keluarga yang bersumber dari data harapan (PKH) dikecamatan Silangkitang

2. Data sekunder, yaitu data yang diambil dari badan pusat statistic (BPS), Serta data-data yang bersumber dari kantor Kelurahan Ulumahuam.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara, sebagai tehnik komunikasi langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
2. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data melalui penyeberan seperangkat daftar pertanyaan kepada responden yang sudah menjadi sample penelitian.

### **3. 7 Tehnik Analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dan membedakan hasil pengamatan untuk perlakuan yang tidak sama. Teknik analisis data deskriptif dalam penelitian ini meliputi :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari data responden dengan menggunakan kuesioner dan wawancara

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap penyederhaan, penggolongan dan membuat data yang tidak diperlukan.



### 3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksud sebagai kegiatan penyajian data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami

### 4. Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap verifikasi data terakhir dengan temuan data penelitian sebagai bentuk jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Kotapinang. Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, sehingga wilayah ini memiliki potensi geografis karena dilalui oleh Jalur Lintas Timur Sumatera, yaitu jalur mulai dari Batas Aceh –Tanjung Pura –Binjai –Medan – Lubuk Pakam –Sei Rampah –Tebing Tinggi –Indrapura –Limapuluh –Sei Bejangkar –Kisaran –Simpang Kawat –Pulau Rakyat –Aek Kanopan – Rantauparapat –Simpang Kotapinang –Batas Riau.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak diantara koordinat 102° 00' -102° 55' Lintang Utara dan 99° 40' 00" -100° 26' 00" Bujur Timur. Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki luas wilayah sekitar 3.116,00

Km<sup>2</sup>(311.600 Ha) yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Torgamba yaitu seluas 113.640 Ha atau sekitar 36,47% dari luas total Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kecamatan Silangkitang yaitu hanya seluas 30.370 Ha atau sekitar 9,75% dari luas total Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kecamatan	Gambaran Desa		
	Ibu Kota	Desa	Luas
Sungai Kanan	Langga Payung	8	484,35
Torgamba	Cikampak	14	1136,40
Kotapinang	Kotapinang	9	482,40
Silangkitang	Silangkitang	6	303,70
Kampung Rakyat	Tanjung Medan	15	709,15

Secara administratif Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan dengan

beberapa daerah, yaitu :

1. Sebelah Utara: Kabupaten Labuhanbatu;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Sebelah Barat: Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Sebelah Timur: Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan permukiman di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akibat dari pemekaran wilayah, sehingga daerah ini menjadi tempat tujuan berbagai masyarakat terutama di Kotapinang, seiring dengan peningkatan statusnya sebagai Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Gambaran mengenai kondisi kependudukan dan sumber daya manusia di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat dari jumlah

dan kepadatan penduduk, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut kelompok umur maupun jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.

Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 289.655 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Torgamba yaitu 103.362 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Silangkitang yaitu 29.317 jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayah, maka rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mencapai 93 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Kotapinang yaitu 116 Jiwa/Km<sup>2</sup>, dan Kepadatan penduduk paling rendah terdapat di Kecamatan Kampung Rakyat yaitu 75 Jiwa/Km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2013 berjumlah 289.655 jiwa, yang terdiri dari 147.688 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 141.967 jiwa penduduk wanita. Jika dilihat berdasarkan angka sex ratio sebesar 104,03 maka dapat dikemukakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dengan perbandingan 104 orang laki-laki berbanding dengan 100 orang penduduk perempuan.

Jika dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara usia angkatan kerja (umur 15 sampai dengan 55 tahun) dengan usia non produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 55 tahun) hampir sama. Jumlah penduduk yang berusia antara 15 sampai dengan 55 terdapat sebanyak 168.645 Jiwa atau

sebesar 58,2 % dari jumlah penduduk yang ada. Sedangkan jumlah penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dan berusia diatas 55tahun terdapat sebanyak 121.010 Jiwa atau sebesar 41,8% dari jumlah penduduk yang ada. Dengan demikian maka perbandingan antara usia produktif dengan usia non produktif adalah satu berbanding satu, yang artinya bahwa setiap satu orang usia produktif harus menanggung satu orang usia non produktif.

Mayoritas penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada umumnya adalah merupakan Suku Jawa. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang ada sebesar 49,8% diantaranya merupakan Suku Jawa. Sedangkan suku terbesar kedua adalah suku Batak yang terdapat sekitar 45,8% dari jumlah penduduk yang ada. Dan sisanya adalah merupakan suku Minang sebesar 0,57%, suku Melayu 0,47% dan suku lainnya sebesar 3,40%.

Jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada umumnya adalah beragama Islam. Jumlah penduduk yang beragama Islam terdapat sebesar 87,64 %. Sedangkan Agama terbesar kedua adalah Agama Protestan yang terdapat sekitar 11,17% dari jumlah penduduk yang ada. Dan sisanya adalah merupakan Agama Katolik sebesar 1,03%, Agama Budha 1,03%, Agama Hindu sebesar 0,4% dan Agama lainnya sebesar 0,14%.

Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak diantara koordinat 1026' 00'' sampai dengan 2012' 55'' Lintang Utara dan 99040' 00'' sampai dengan 100026' 00'' Bujur Timur. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk kedalam kawasan dataran rendah yang berada pada daerah transisi antara kawasan pesisir (pantai timur) dengan kawasan

pegunungan (dataran tinggi bukit barisan). Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau.

Secara topografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada ketinggian 100 s/d 500 M di atas permukaan laut. Pada umumnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada ketinggian kurang dari 100 M di atas permukaan laut. Ketinggian antara 100–500 M di atas permukaan laut hanya terdapat di Kecamatan Sungai Kanan, tepatnya pada bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **4.1.2. Deskripsi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan komperatif. Penelitian ini menggunakan instrumen dalam bentuk angket sebanyak 15 item pernyataan yang terdiri dari 5 item pernyataan untuk kebijakan PKH Sebelum Covid 19, 10 item pernyataan untuk variabel kebijakan PKH di Masa Covid 19. Angket penelitian ini disebar dan diberikan 50 responden yang terdiri dari masyarakat Desa Ulumahuam dan Desa Rintis.

Hasil data angket penelitian yang disebar kemudian diberikan nilai dengan metode *skala likert* dan kemudian ditabulasi, dan diolah dengan menggunakan program SPSS, selanjutnya data penelitian dideskripsikan melalui data primer berupa angket yang telah diuji dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan disimpulkan berdasarkan karakteristik identitas responden sesuai tabel berikut di bawah ini:

##### **4.1.2.1. Karakteristik Identitas Responden**

Karakteristik yang menjadi identitas responden dalam tabel berikut ini menunjukkan karakteristik responden berdasarkan kriteria penilaian jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan dari responden yang dijadikan sampel dalam penelitian. Data identitas responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel IV.1.**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Masyarakat PKH	
	Frequency	Percent
Laki-laki	20	40,0
Perempuan	30	60,0
Total	50	100,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2021

Berdasarkan data tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik data jenis kelamin, mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 30 orang (60,0%) dan minoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang (40,0%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik identitas responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini mayoritas responden yang mengikuti program PKH adalah masyarakat dengan jenis kelamin perempuan

**Tabel IV.2.**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Masyarakat PKH	
	Frequency	Percent
< 30 tahun	32	64,0
30-55 Tahun	16	32,0
> 55 tahun	2	4,0
Total	50	100,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2021

Berdasarkan data tabel IV.2 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik usia responden, mayoritas PKH memiliki usia pada kelompok umur < 30 tahun sebanyak 32 (64,0%) dan kelompok usia dengan rentang 30-55 tahun sebanyak 16 orang (32,0%) dan minoritas pada kelompok usia >55 tahun sebanyak 2 orang (4,0%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan karakteristik usia responden yang dilakukan dalam penelitian ini, mayoritas responden pada masyarakat yang menjadi anggota PKH pada kelompok usia < 30 tahun dan diikuti dengan responden dengan rentang usia 30-55 tahun.

**Tabel IV.3.**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Masyarakat PKH	
	Frequency	Percent
Petani/Nelayan	28	56,0
Buruh	15	30,0
Wiraswasta	7	14,0
Total	50	100,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2021

Berdasarkan data tabel IV.3 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik pekerjaan responden, mayoritas responden memiliki pendidikan petani atau nelayan sebanyak 28 orang (56,0%) dan pada pekerjaan buruh sebanyak 15 orang (30,0%) dan sisanya dengan pekerjaan wiraswasta sebanyak 7 orang (14,0%).

#### **4.1.2.2. Analisis Komperatif Data Penelitian**

Analisis komperatif data dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data yang berasal dari data-data yang telah dideskripsikan dari data sebelumnya berdasarkan instrumen penelitian yang sudah divalidkan dan



memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi (handal). Data yang dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu statistik tertentu dengan melakukan pengujian hipotesis untuk pengambilan kesimpulan, yang dirangkum dalam uji data pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV.4**  
**Data Uji Komparatif (T-Tes)**  
**Group Statistics**

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Program PKH	Sebelum Pandemi	25	117.3400	11.99764	1.69672
	Masa Pandemi	25	111.2200	14.38152	2.03385

Berdasarkan data tabel IV.13 tabel *Group Statistics* bertujuan memaparkan nilai-nilai statistik deskriptif untuk variabel kebijakan PKH sebelum pandemi dan pada masa pandemi. Menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang dihasilkan dari variabel kebijakan PKH sebelum pandemi dengan nilai rata-rata sebesar 117,34 dengan standar deviasi sebesar 11,99 sedangkan untuk masa pandemi dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 111,22 dan standar deviasi sebesar 14.38. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PKH sebelum masa pandemi dan di masa pandemi memiliki perbedaan dengan nilai mean lebih tinggi bila dibandingkan dengan kebijakan PKH sebelum masa pandemi, dengan selisih nilai rata-rata sebesar 6,12 sehingga dengan demikian  $H_0$  dalam penelitian ini ditolak dan  $H_a$  diterima yang memiliki arti bahwa Ada perbedaan rata-rata kebijakan PKH sebelum masa pandemi dan kebijakan PKH di masa pandemi

Selanjutnya untuk mengetahui nilai komperatif dari kebijakan PKH sebelum masa pandemi dan selama masa pandemi dapat dilihat dari hasil pengujian independent sample test dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.6**  
**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	90% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kepuasan Konsumen	Equal variances assumed	2.330	.130	2.311	98	.023	6.12000	2.64867	1.72176	10.51824
	Equal variances not assumed			2.311	94.948	.023	6.12000	2.64867	1.72041	10.51959

Berdasarkan data tabel di atas, dengan demikian diuraikan pengujian sebagai berikut :

1. Hipotesis :

$H_a : \mu_A \neq \mu_B$  ( Ada perbedaan rata-rata Kebijakan PKH di masa pandemi dan di saat masa pandemi)

2. Uji Statistik :

$$t_{hitung} = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{S_A^2}{N_A} + \frac{S_B^2}{N_B}}} \text{ atau } t_{hitung}$$

$$t_{hitung} = \frac{117,34 - 111,22}{\sqrt{\frac{11,99764}{50} + \frac{14,38152}{50}}}$$

$$t_{hitung} = 2,311$$

dengan ketentuan  $t_{tabel} = (df) n-2$  atau  $100-2 = 98$

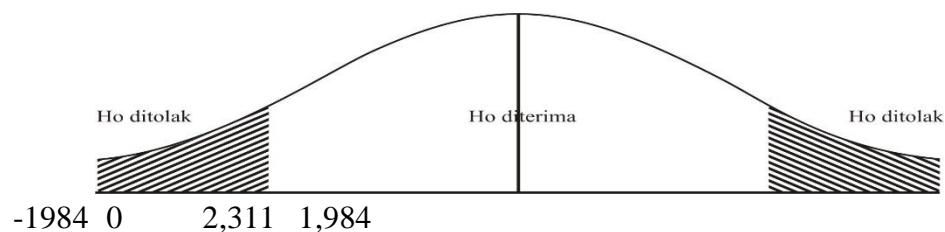
$$t_{tabel} = 1,984$$

### 3. Kriteria uji :

Terima  $H_0$  apabila :  $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq + t_{\text{tabel}}$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :  $-1,984 < 2,311 < 1,984$

Hasil kriteria pengujian hipotesis di atas ternyata tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dengan demikian maka  $H_0$  ditolak. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat dalam kurva distribusi normal sebagai berikut:



**Gambar IV.1**  
**Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis**

### 4. Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yaitu terdapat perbedaan kebijakan PKH sebelum Pandemi dengan Kebijakan PKH di masa Pandemi, atau dikatakan signifikan jika nilai perolehan sig  $0,023 < \alpha = 0,10$  atau dengan persentase  $2,3\% < \alpha = 10\%$  maka dapat dikategorikan signifikan.

#### 4.2. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui hipotesis dari penelitian berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

## **1. Perkembangan kualitas hidup rumah tangga penerima kebijakan program keluarga harapan (PKH) di masa pandemi covid 19 pada Desa Uulumahuam Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kecamatan Silangkitang**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hidup rumah tangga penerima kebijakan PKH di masa pandemi covid 19 kualitas hidupnya menurun dibandingkan sebelum masa pandemi hal ini disebabkan karena masyarakat yang menerima PKH kondisinya semakin sulit, hal ini ditunjukkan dari jawaban responden penghasilan data perbulannya rata-rata responden menjawab 500-1 juta karena di masa pandemi covid 19 usaha mereka sepi dan ada juga usaha mereka sampai tutup.

Dari hasil penelitian kepada masyarakat penerima bantuan PKH di Kecamatan Silangkitang maka dampak positif yang paling utama dari pemberian bantuan Program Keluarga Harapan yaitu pe-ngurangan beban pengeluaran bagi Rumah Tangga Sangat Miskin. Itulah alasan mereka mengatakan bahwa dampak yang paling utama yaitu mengurangi beban mereka dalam hal mengakses pendidikan anak-anaknya sekolah di tingkat SD, SMP, SMA dimana sebelum menerima bantuan PKH pendidikan anak-anak sempat terputus namun setelah adanya bantuan PKH anak-anak dapat melanjutkan kembali sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih baik lagi.

Dampak positif yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi pemeriksaan kesehatan anak balita dan kesejahteraan sosial untuk memastikan pemberian asupan gizi untuk lansia dan disabilitas.

Dari pemaparan di atas bahwa setelah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan aspek pendidikan dan kesehatan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin mengalami perubahan. Terbuktinya dengan kondisi sosial peserta PKH yang saat ini mengalami perubahan dibidang pendidikan dan kesehatan yang lebih layak. Mengingat bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan aspek yang penting bagi kehidupan yang harus terpenuhi secara optimal.

PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Serta mengubah kelompok yang paling miskin, dengan adanya bantuan sosial PKH yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari serta mampu meningkatkan kesejahteraan akibat kesulitan ekonomi terhadap pengeluaran rumah tangga. Seperti yang kita ketahui banyak masyarakat miskin atau penerima bantuan masih banyak yang mengeluh kesulitan ekonomi padahal pemerintah sudah melakukan upaya dengan adanya PKH diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin. Namun dana atau bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat banyak yang sudah menyalahgunakan dengan membeli barang yang tidak dibutuhkan sama sekali.

## **2. Perkembangan dana kebijakan PKH sebelum dan di masa pandemi covid 19 di Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Terdapat perbedaan kebijakan PKH sebelum Pandemi dengan Kebijakan PKH di masa Pandemi hal ini dapat dilihat bahwa jumlah dana yang diterima sebelum masa pandemi untuk ibu hamil sebesar Rp. 2.400.000 sedangkan di masa pandemi berubah menjadi sebesar Rp. 3.000.000. Begitu juga dana untuk anak usia dini, SD, SMP, SMA, Disabilitas Berat dan lanjut usia. Bukan hanya itu saja bantuan berupa sembako juga mengalami perubahan atau pemerintah menaikkan jumlah bantuan sembako yang sebelumnya sebesar Rp. 150.000/Keluarga, menjadi Rp. 200.000/Keluarga.

Kemiskinan yang terjadi di daerah ini disebabkan oleh rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat daerah tersebut, hal ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki warga Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sehingga, banyak warga yang menganggur karena sulitnya memperoleh pekerjaan karena pendidikan yang rendah juga, karena hal inilah tingkat kepercayaan perusahaan-perusahaan daerah tersebut pun menjadi rendah untuk mempekerjakan masyarakat setempat di perusahaan mereka. Kemiskinan tersebut juga terjadi karena kondisi alam yang bisa dilihat semakin buruk. Karena pekerjaan masyarakat Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dominan sebagai Nelayan, mereka hanya bisa menangkap ikan tergantung pada keadaan cuaca. Terkadang kondisi laut yang pasang surut yang tidak menentu menyebabkan pendapatan penghasilan ikan nelayan juga tidak menentu.

Pemerintah dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH), program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program

penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Serta mengubah kelompok yang paling miskin, dengan adanya bantuan sosial PKH yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari serta mampu meningkatkan kesejahteraan akibat kesulitan ekonomi terhadap pengeluaran rumah tangga. Seperti yang kita ketahui banyak masyarakat miskin atau penerima bantuan masih banyak yang mengeluh kesulitan ekonomi padahal pemerintah sudah melakukan upaya dengan adanya PKH diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin. Namun dana atau bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat banyak yang sudah menyalahgunakan dengan membeli barang yang tidak dibutuhkan sama sekali.

Seperti yang kita ketahui banyak saat ini yang terjadi penerima bantuan yang tidak tepat sasaran sebagian beberapa masyarakat mengaku tidak mampu padahal mampu dan tidak layak menerima bantuan sosial akan tetapi ikut mendaftarkan diri menjadi calon anggota PKH. Kejadian seperti ini sering terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Meskipun sudah ditetapkan kriteria penerima PKH namun banyak yang dikatakan mampu menjadi salah satu penerima PKH. Hal ini menyebabkan banyak data masyarakat miskin yang masih diragukan sehingga akan berdampak dengan ketidaktepatan sasaran bantuan dana PKH terhadap masyarakat yang berhak. Sehingga bukan orang miskin lagi yang menerima bahkan orang lain dapat menerima PKH.



### **3. Evaluasi Keluarga Penerima Kebijakan PKH di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat jumlah penduduk miskin Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tahun 2018 sebesar 16.341 mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 160.19 sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengalami peningkatan menjadi 16.646.

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat yang mengikuti kebijakan PKH di Kecamatan Silangkitang selama masa pandemi karena tidak memiliki penghasilan karena usaha yang dilakukan masyarakat tutup sehingga masyarakat tersebut tidak punya penghasilan dan akhirnya mereka mendapatkan saran dari Kepala Dusun untuk mengikuti atau mendaftar sebagai anggota PKH.

Peningkatan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Silangkitang karena disebabkan oleh adanya masa pandemi sehingga ada sebagian masyarakat yang dulunya bekerja sebagai buruh sekarang di rumahkan atau di PHK karena adanya pengurangan buruh dari perusahaan, hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Silangkitang mengalami peningkatan. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH, namun ada masyarakat yang mampu justru mendapatkan bantuan PKH, hal ini menunjukkan bahwa data-data yang disusun oleh petugas PKH dan petugas PKH lebih mengutamakan keluarganya sendiri di bandingkan masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan PKH.

Kemiskinan yang terjadi di daerah ini disebabkan oleh rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat daerah tersebut, hal ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki warga Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sehingga, banyak warga yang menganggur karena sulitnya memperoleh pekerjaan karena pendidikan yang rendah juga, karena hal inilah tingkat kepercayaan perusahaan-perusahaan daerah tersebut pun menjadi rendah untuk mempekerjakan masyarakat setempat di perusahaan mereka. Kemiskinan tersebut juga terjadi karena kondisi alam yang bisa dilihat semakin buruk. Karena pekerjaan masyarakat Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dominan sebagai Nelayan, mereka hanya bisa menangkap ikan tergantung pada keadaan cuaca. Terkadang kondisi laut yang pasang surut yang tidak menentu menyebabkan pendapatan penghasilan ikan nelayan juga tidak menentu.

Pemerintah dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH), program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi perbandingan kebijakan PKH sebelum masa pandemi dan di masa pandemi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hidup rumah tangga penerima kebijakan PKH di masa pandemi covid 19 kualitas hidupnya menurun dibandingkan sebelum masa pandemi hal ini disebabkan karena masyarakat yang menerima PKH kondisinya semakin sulit, hal ini ditunjukkan dari jawaban responden penghasilan data perbulannya rata-rata responden menjawab 500-1 juta karena di masa pandemi covid 19 usaha mereka sepi dan ada juga usaha mereka sampai tutup.
2. Terdapat perbedaan kebijakan PKH sebelum Pandemi dengan Kebijakan PKH di masa Pandemi hal ini dapat dilihat bahwa jumlah dana yang diterima sebelum masa pandemi untuk ibu hamil sebesar Rp. 2.400.000 sedangkan di masa pandemi berubah menjadi sebesar Rp. 3.000.000. Begitu juga dana untuk anak usia dini, SD, SMP, SMA, Disabilitas Berat dan lanjut usia. Bukan hanya itu saja bantuan berupa sembako juga mengalami perubahan atau pemerintah menaikkan jumlah bantuan sembako yang sebelumnya sebesar Rp. 150.000/Keluarga, menjadi Rp. 200.000/Keluarga.

3. Dengan adanya kebijakan PKH diharapkan masyarakat miskin dapat berkurang namun pada kenyataannya masyarakat miskin semakin meningkat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka untuk meningkatkan kebijakan PKH sebelum pandemi dan di masa pandemi, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi kordinator dan pendamping PKH sebaiknya lebih memperhatikan data-data masyarakat yang mengajukan program PKH agar dana PKH ini dapat diberikan atau tepat sasaran kepada masyarakat yang layak terhadap program PKH
2. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya dapat menambahkan variabel lain dalam mengukur kebijakan PKH di masa pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Andana Yoshanda. (n.d.). No Title. *Pendapatan Nasional*, 5.
- Belakang, A. L. (2015). *No Title*. 1–8.
- Belanja, A., Dan, D., & Irdhaanisyahgmailcom, E. (2012). *Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di provinsi sulawesi utara*. 1–12.
- Equilibrium, J., & Sosiologi, P. (2016). *J urnal E quilibrium J urnal E quilibrium. III(2)*, 126–135.
- Deddy Rutiono (2008). *Investasi*, A. P., & Kerja.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Hamalik, Oemar. (2001). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Jhingan, M. L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press
- Mubyarto. 2005. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES
- Pendidikan, J., Dan, E., Vol, B., Fakultas, A., Unj, E., Fakultas, D., & Unj, E. (2013). *Sri Indah Nikensari, SE, M.Si (. 1(1)*, 77–102.
- Pendidikan, P. B., Pdb, D. A. N., & Indeks, T. (2014). *Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012*. 32–46.
- Rivai, Veithzal. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo Persada
- Survei, B., & Rumah, P. (2013). *Perdesaan Di Desa Sawah Berbasis Padi. 2013*, 35–46.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta : Erlangga
- <http://blogberita.net/2008/06/05/14.syarat-warga-miskin-penerimabl/1810208/19.25>
- Badan pusat statistik Labuhan Batu Selatan ,2021 Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2017. SUSENAS, Tahun 2010.

# LAMPIRAN

<b>NO URUT KUISIONER</b>	
<b>SURVEYOR</b>	
<b>Tanggal dan Waktu Wawancara</b>	
<b>Lokasi</b>	

**KUESIONER ANALISA DAMPAK EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI ERA PANDEMI COVID 19 PADA  
KECAMATAN  
SILANGKITANG KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

**I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : \_\_\_\_\_
2. Jenis Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan
3. Dusun :
4. Desa : \_\_\_\_\_
5. No Identitas PKH : \_\_\_\_\_
6. No. Hand Phone (HP) : \_\_\_\_\_

**II. DATA KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI**

1. Golongan Usia saudara :
  - < 25 Tahun
  - 25 – 35 Tahun
  - 36 – 46 Tahun
  - 47 – 60 Tahun
  - > 60 Tahun
2. Jenis Pekerjaan saudara
  - Wiraswasta/Pedagang
  - Buruh
  - Petani/Nelayan
  - Honorer
3. Pendidikan terakhir :
  - SMP Sederajat
  - SMA/SMK
4. Rata-rata Tingkat penghasilan bulanan :
  - 500 ribu - 1 juta
  - Rp 1 Juta s/d Rp 2 Juta
  - ± 3 juta
5. Status tempat tinggal
  - Rumah sendiri
  - Rumah kontrakan
  - Rumah keluarga

6. Jumlah Anak
  - 1-2
  - 3-4
  - $\geq 4$
7. Jumlah Tanggungan
  - 3
  - 4
  - 5
8. Jumlah Dana PKH yang diterima
  - 600.000
  - 1.390.000
  - 2.200.000

### III. Mengikuti Program Keluarga Harapan

1. Apakah anda mengetahui PKH

- Ya
- Tidak

2. Dana jenis PKH yang anda terima

- Pendidikan
- Kesehatan
- Lansia
- Disabilitas

3. Darimana informasi yang saudara dapatkan dari PKH :

- pemerintah desa
- masyarakat
- keluarga
- pendamping PKH
- media cetak
- media online
- sosial media

4. Mengapa saudara mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) ?

- kondisi ekonomi
- tidak punya penghasilan
- saran kepala dusun
- informasi



*Petunjuk pengisian:*

*Isilah jawaban sesuai pendapat anda dengan memberikan tingkat penilaian di kolom yang tersedia*

NO	PERNYATAAN	TIDAK PUAS			PUAS		
		1	2	3	4	5	6
1	Menjadi peserta PKH						
2	Jumlah dana bantuan PKH						
3	Manfaat dari PKH yang anda terima						
4	Penggunaan Dana PKH						
5	Pencairan dana PKH						

**IV. Pertanyaan tentang Bagaimana Kebijakan PKH sebelum dan Selama pandemi :**

NO	Daftar Pertanyaan Bagaimana harapan dari PKH ke Masyarakat	1	2	3	4	5	6
<b>Informasi</b>							
1	Adanya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang PKH						
2	Di masa pandemi PKH tetap berjalan						
3	Pendamping PKH memberikan masukan dan arahan tentang penggunaan dana PKH						
<b>Menjadi Peserta</b>							
1	Pemberian bantuan dana PKH sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan						
2	Adanya tambahan bantuan di masa pandemi covid 19						
3	Perekonomian setelah mendapatkan bantuan PKH						

4	Adanya pemberian sembako bagi program PKH						
<b>Setelah menerima Dana PKH</b>							
1	Informasi pencairan dana PKH tepat waktu						
2	Pengelolaan keuangan setelah mendapatkan bantuan PKH						
3	Di masa pandemi PKH tetap berjalan						

**TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA**

No.	Kriteria Responden												Total
Res	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Penghasilan	Tempat Tinggal	Anak	Tanggung	Dana PKH	Mengetahui PKH	Jenis PKH Diterima	Alasan Ikut PKH	
1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	40
2	1	2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	39
3	1	2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	40
4	1	2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	38
5	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	35
6	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	33
7	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	39
8	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	32
9	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	38
10	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	42
11	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	40
12	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	34
13	1	3	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	43
14	1	2	2	1	1	3	2	2	2	1	2	1	37
15	2	2	1	1	2	3	2	2	2	1	2	1	40
16	2	1	1	1	2	3	2	2	2	1	2	1	43
17	1	1	1	1	1	3	2	2	2	1	2	1	43
18	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	2	1	45

19	1	1	2	1	1	2	3	2	2	1	3	1	36
20	1	2	1	1	1	2	3	2	2	1	3	1	41
21	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	42
22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	39
23	2	2	1	1	2	2	3	2	2	1	1	1	36
24	2	1	1	1	1	2	3	2	2	1	1	1	40
25	2	1	2	1	1	2	3	3	2	1	1	1	35
26	2	2	2	1	2	2	3	3	2	1	1	1	32
27	2	1	2	2	3	2	2	3	2	1	1	1	35
28	1	1	1	2	3	2	2	3	3	1	1	1	38
29	1	1	2	2	3	2	2	3	3	1	1	1	44
30	1	1	1	2	3	2	2	3	3	1	1	2	40
31	2	1	1	2	2	2	2	3	2	1	1	2	33
32	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	45
33	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	38
34	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	39
35	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	43
36	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	35
37	1	1	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	38
38	2	1	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	38
39	2	1	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	45
40	2	1	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	39
41	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	34

42	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	42
43	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	39
44	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	42
45	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	45
46	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	44
47	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	44
48	2	1	1	2	2	3	2	2	2	1	1	1	43
49	2	1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	1	46
50	2	1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	2	39
	20	32	28	12	15	2	7	19	21	50	39	40	
	30	16	15	38	31	40	36	24	26	0	9	10	
		2	7		4	8	7	7	3	0	2		
Jumlah	50		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	

Kebijakan PKH					Total	Pandemi										Total
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	4	4	3	3	19	4	5	4	4	5	3	3	4	4	4	40
4	4	4	3	4	19	4	5	4	4	4	3	4	4	4	3	39
4	3	3	2	3	15	5	5	4	4	5	2	3	4	4	4	40
4	3	4	3	4	18	4	4	4	4	3	3	4	5	3	4	38
4	3	1	2	3	13	4	4	4	3	4	2	3	5	2	4	35
4	4	3	3	3	17	4	4	5	3	4	3	3	4	1	2	33

4	2	1	2	3	12	4	5	4	4	5	2	3	4	4	4	39
4	3	2	3	3	15	4	5	3	4	3	3	3	4	1	2	32
4	4	2	3	3	16	4	5	4	4	5	3	3	2	4	4	38
4	5	4	4	4	21	5	4	5	3	5	4	4	4	4	4	42
5	4	4	4	4	21	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	40
4	4	3	4	3	18	4	4	4	2	4	4	3	3	3	3	34
5	3	4	4	4	20	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	43
4	3	3	4	3	17	3	5	4	2	5	4	3	4	4	3	37
4	4	5	4	4	21	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	4	4	3	3	16	4	5	5	5	5	3	3	5	4	4	43
4	3	3	3	4	17	4	5	5	5	5	3	4	5	3	4	43
4	3	3	4	5	19	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	45
4	4	3	2	2	15	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	36
4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
5	5	4	4	5	23	4	4	4	3	5	4	5	5	4	4	42
4	3	5	5	4	21	4	4	4	4	3	5	4	4	3	4	39
4	4	4	4	2	18	5	4	4	4	3	4	2	3	3	4	36
4	4	5	4	4	21	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	40
5	5	4	4	5	23	4	4	4	3	3	4	5	4	2	2	35
3	4	3	3	3	16	4	2	2	3	4	3	3	3	4	4	32
3	4	4	4	4	19	4	2	2	3	4	4	4	3	4	5	35
5	4	4	4	3	20	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38
5	5	5	4	5	24	4	5	4	5	5	4	5	5	3	4	44

5	3	2	3	4	17	5	5	5	4	3	3	4	4	3	4	40
5	3	2	2	3	15	3	4	5	3	4	2	3	3	3	3	33
5	4	2	4	5	20	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	45
5	4	2	3	4	18	4	4	4	4	5	3	4	4	4	2	38
5	2	2	2	3	14	3	5	4	4	5	2	3	4	5	4	39
4	2	4	3	5	18	3	5	4	4	5	3	5	4	5	5	43
3	3	3	3	4	16	4	4	4	4	4	3	4	2	3	3	35
4	4	2	2	4	16	5	5	3	5	4	2	4	2	4	4	38
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	38
4	4	4	4	5	21	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	45
4	4	3	3	4	18	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
4	3	2	4	5	18	4	3	3	3	3	4	5	2	4	3	34
5	3	5	4	5	22	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	42
4	3	5	3	4	19	5	5	3	5	4	3	4	3	4	3	39
4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
4	5	4	3	5	21	5	5	4	5	4	3	5	5	4	5	45
5	5	4	4	5	23	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44
5	4	4	4	5	22	5	5	3	4	4	4	5	5	5	4	44
4	4	4	5	5	22	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	43
5	4	4	4	5	22	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	46
4	3	3	4	5	19	3	3	4	4	4	4	5	5	4	3	39

/PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.

**Correlations**

Correlations

		A1	A2	A3	A4	A5	Total
A1	Pearson Correlation	1	,407**	,311**	,151	-,038	,556**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002	,147	,719	,000
	N	50	50	50	50	50	50
A2	Pearson Correlation	,407**	1	,207*	,229*	,074	,580**
	Sig. (2-tailed)	,000		,045	,026	,476	,000
	N	50	50	50	50	50	50
A3	Pearson Correlation	,311**	,207*	1	,262*	-,163	,593**
	Sig. (2-tailed)	,002	,045		,011	,117	,000
	N	50	50	50	50	50	50
A4	Pearson Correlation	,151	,229*	,262*	1	,412**	,688**
	Sig. (2-tailed)	,147	,026	,011		,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
A5	Pearson Correlation	-,038	,074	-,163	,412**	1	,426**
	Sig. (2-tailed)	,719	,476	,117	,000		,000



	N	50	50	50	50	50	50
Total	Pearson Correlation	,556**	,580**	,593**	,688**	,426**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	50	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

/VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.753	6

T-TEST GROUPS=Kolam(1 2)

/MISSING=ANALYSIS

/VARIABLES=Kebijakan PKH /CRITERIA=CI(.50).

### Group Statistics

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Program PKH	Sebelum Pandemi	25	117.3400	11.99764	1.69672
	Masa Pandemi	25	111.2200	14.38152	2.03385

### Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	90% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kebijakan PKH	Equal variances assumed	2.330	.130	2.311	98	.023	6.12000	2.64867	1.72176	10.51824

Equal variances not assumed			2.311	50.508	.023	6.12000	2.64867	1.72041	10.51959
-----------------------------	--	--	-------	--------	------	---------	---------	---------	----------



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 184/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/4/3/2021

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 4/3/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ade Fitriani harahap  
NPM : 1705180028  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Keuangan dan perbankan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Pemerataan bansos terhadap penerima Pkh

Rencana Judul : 

1. Analisa dampak program keluarga harapan (PKH ) terhadap pola pengeluaran rumah tangga di kabupaten labuhan batu selatan
2. Analisa dampak peverima program keluarga harapan (PKH) terhadap kesehatan gizi anak balita
3. Analisis tingkat kebutuhan modal bagi UMKM

Objek/Lokasi Penelitian : Masyarakat kab,labuhan batu selatan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Ade Fitriani harahap )



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 184/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/4/3/2021

Nama Mahasiswa : Ade Fitriani Iarrahap  
NPM : 1705180028  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Keuangan dan perbankan  
Tanggal Pengajuan Judul : 4/3/2021  
Nama Dosen pembimbing\*) : Sri Endang Rahayu

Judul\*\*)

ANALISA DAMPAK EVALUASI REBIDYAKAN KELUARGA  
MENDAPAN (PEH) di ERA PANDEMI COVID-19  
PADA KECAMATAN SILANGITANG KABUPATEN  
LABUHAN ISATU SELATAN.

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, .....

Dosen Pembimbing

Keterangan

\*) Ditulis oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Ditulis oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah tembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL JURUSAN MANAJEMEN**

Pada hari ini Senin, 07 Juni 2021 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi pembangunan menerangkan bahwa :

Nama : Ade Fitriani Harahap  
N.P.M. : 1705180028  
Tempat / Tgl.Lahir : Mampang, 09 Oktober 1999  
Alamat Rumah : Jl. Gunung Mas No. 18, Glugur Darat II Medan  
JudulProposal : Analisa Dampak Evaluasi Kebijakan Keluarga Harapan (PKH) di Era Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	✓ Perubahan judul menjadi "ANALISA DAMPAK EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI ERA PANDEMI COVID-19 EC KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN.
Bab I	✓ Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian
Bab II	Tinjauan pustaka
Bab III	Populasi dan sampel
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus


Medan, Senin, 07 Juni 2021

**TIM SEMINAR**

Ketua

  
Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.

Pembimbing

  
Sri Endang Rahayu, SE., M.Si.

Sekretaris

  
Dra. Hj. Rosyifa Hafni, M.Si.

Pembanding

  
Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Senin, 07 Juni 2021** menerangkan bahwa:

**Nama** : Ade Fitriani Harahap  
**N.P.M.** : 1705180028  
**Tempat / Tgl.Lahir** : Mampang, 09 Oktober 1999  
**Alamat Rumah** : Jl. Gunung Mas No. 18, Glugur Darat II Medan  
**JudulProposal** : Analisa Dampak Evaluasi Kebijakan Keluarga Harapan (PKH) di Era Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Sri Endang Rahayu, SE., M.Si.*

Medan, Ade Fitriani Harahap

**TIM SEMINAR**

**Ketua**

**Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.**

**Secretaris**

**Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.**

**Pembimbing**

**Sri Endang Rahayu, SE., M.Si.**

**Pembanding**

**Dr. Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.**

**Diketahui / Disetujui**

**A.n. Dekan  
Wakil Dekan - I**

**Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.**







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : ADE FITRIANI HARAHAP  
N.P.M : 1705180028  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Alamat Rumah : Jl. Gunung Mas No.18 Glugur Darat II Medan  
Judul Skripsi : ANALISA DAMPAK EVALUASI KEBIJAKAN KELUARGA HARAPAN (PKH) DI ERA PANDEMI COVID-19 PADA KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
30/08-2021	1) Hasil penelitian 2) cara teknik wawancara responden		
1/09-2021	1) pembahasan -tambahan pembahasan 2) kesimpulan & saran		
3/09-2021	1).revisi pembahasan 2) revisi tabel		
9/09-2021	ACC sidang meja hijau		

Medan, Agustus 2021  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

SRI ENDANG RAHAYU, SE, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email : [rector@umsu.ac.id](mailto:rector@umsu.ac.id)

Nomor : 1977 /II 3-AU/UMSU-05/ F / 2021 Medan, 19 Muharram 1443 H  
Lampiran : 28 Agustus 2021 M  
Perihal : **IZIN RISET PENDAHULUAN**

Kepada Yth.  
Bapak / Ibu Pimpinan  
Kantor Camat Silangkitang Kab.Labusel  
Jln.Lintas Silangkitang Desa Ulumahuan dan Desa Rintis  
Di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program **Studi Strata Satu ( S-1 )**

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ade Fitriani Harahap  
Npm : 1705180028  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul : Analisis Dampak Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Era Pandemi Covid - 19 Pada Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb



Dekan

H. JANURI, SE.,MM.,M.Si.

**Tembusan :**

1. Peringgal



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email : [rector@umsu.ac.id](mailto:rector@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1977 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2021**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :  
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**  
Pada Tanggal : **28 Agustus 2021**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Ade Fitriani Harahap**  
N P M : **1705180028**  
Semester : **VIII (Delapan)**  
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Dampak Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Era Pandemi Covid - 19 Pada Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

Dosen Pembimbing : **Sri Endang Rahayu,SE.,M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkanya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **28 Agustus 2022**
4. Revisi Judul.....

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : **Medan**  
Pada Tanggal : **19 Muharram 1443 H**  
**28 Agustus 2021 M**



Dekan

**H. JANURI, SE.,MM.,M.Si.**

Tembusan :

1. Peringgal